

# INTEGRITAS MODERASI BERAGAMA

Oleh: **Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D.**  
(Guru Besar dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya)

Sebagai sebuah negara yang multikultural, Indonesia memperlihatkan kekayaan khasanah keberagaman yang sangat beragam, kompleks sekaligus menantang. Kompleksitas keberagaman masyarakat Indonesia terletak pada hubungan intra dan antar umat beragama yang memiliki segi-segi perbedaan tertentu, dari yang bersifat remeh-temeh hingga yang bersifat fundamental.

Dalam banyak kasus, perbedaan di kalangan umat beragama bahkan muncul dalam bentuknya yang sangat ekstrem yang tidak jarang menimbulkan kontestasi tafsir, kesalahpahaman, hingga gesekan dan konflik sosial di tingkat akar rumput.

Dengan enam agama resmi, puluhan ormas dan ratusan aliran keagamaan yang berkembang di masyarakat, potensi munculnya gesekan dan konflik sosial bukanlah isapan jempol belaka. Kasus-kasus kekerasan seperti pembakaran rumah ibadah seringkali dilatarbelakangi oleh kesalahpahaman di kalangan masyarakat tentang isu-isu keagamaan yang berkembang. Volume pengeras suara yang ada di rumah ibadah juga sering menjadi *point of dispute* di kalangan masyarakat kita. Ada sebagian masyarakat yang merasa terganggu oleh volume pengeras suara masjid/mushala yang dianggap terlalu keras. Ada juga kontroversi tentang pembangunan rumah ibadah baru yang dianggap “mengancam” keberadaan umat beragama tertentu.



Kasus-kasus di atas, jika boleh disimpulkan, terjadi karena masyarakat kita gagal melakukan rekonsiliasi dan resolusi yang elegan dan bermartabat atas berbagai perbedaan keyakinan keberagaman. Akibatnya, muncullah serangkaian kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang berujung pada gesekan dan konflik sosial kemasyarakatan. Bagi masyarakat tertentu yang telah dibekali dengan *local wisdom* atau pranata sosial tentang mekanisme manajemen konflik dan perbedaan, perbedaan penafsiran keagamaan—seekstrem apapun—barangkali tidak perludikhawatirkan. Namun, bagimasyarakat yang tidak memiliki “kekenyalan sosiologis” akibat absennya pranata sosial-budaya dimaksud, sekecil apapun perbedaan tafsir keagamaan mudah akan diprovokasi dan dikonversi ke arah konflik keras yang destruktif. Di sinilah pentingnya kita memiliki integritas moderasi beragama yang tangguh, kokoh dan “kenyal” secara sosiologis sehingga masyarakat kita tidak mudah untuk diprovokasi ke arah konflik sosial-keagamaan.



## KUALITAS MODERASI BERAGAMA

Tentu saja ada banyak fenomena keberagamaan di Tanah Air yang dinamis dan patut mendapatkan perhatian. Salah satu di antaranya adalah tertangkapnya 370 teroris oleh Densus 88. Yang mengejutkan adalah, ternyata salah satu dari teroris tersebut adalah seorang pengurus MUI Pusat. Sebuah fakta yang mencengangkan dan layak mendapatkan perhatian kita semua. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas moderasi beragama kita masih jauh panggang dari api alias belum mencapai kualitas sebagaimana yang diharapkan. Ada sesuatu yang “belum selesai” di tingkat pemahaman keagamaan yang moderat di internal yang bersangkutan. Mestinya, ketika seseorang ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu pengurus ormas Islam seperti MUI, kualitas moderasi beragama yang dimiliki dianggap sudah selesai. Kenyataannya, ada pengurus ormas moderat seperti MUI yang memiliki ideologi radikal.

Tanpa bermaksud mencurigai terhadap kualitas keberagamaan para pengurus ormas lainnya, fenomena “belum selesainya” paham keagamaan moderat mungkin saja menjadi semacam gunung es; sedikit atau kecil di permukaan, tetapi jauh lebih banyak atau besar di bawah permukaan. Jika fenomena ini yang terjadi, sungguh hal ini cukup mengkhawatirkan kita semua. Mungkin saja terdapat sejumlah tokoh masyarakat Muslim yang duduk di jajaran fungsionaris ormas tertentu memiliki paham keagamaan ganda; satu sisi moderat, namun—secara diam-diam maupun terang-terangan—bersimpati atau bahkan menganut ideologi transnasional (khilafah) atau bersimpati dengan perjuangan kaum jihadis di Indonesia dan mancanegara.

Fenomena lain yang perlu dicermati terkait kualitas moderasi beragama kita adalah penendangan sesajen di Lumajang beberapa saat lalu. Penendangan sesajen oleh seorang oknum relawan di saat meletusnya gunung Semeru membuat banyak pihak merasa geram karena dianggap telah melukai tradisi lokal yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Fenomena penendangan sesajen sempat viral di media sosial dan dilaporkan secara berulang-ulang di sejumlah kanal televisi. Karena dianggap telah melukai tradisi lokal, tak ayal banyak pihak menghendaki agar yang bersangkutan diadili di muka hukum.

Fenomena penendangan sesajen mengindikasikan model beragama yang tidak ramah budaya. Hal semacam ini terjadi akibat munculnya visi beragama yang purifikasionis atau berorientasi pada pemurnian agama dari elemen-elemen budaya lokal. Kepengantutan terhadap model keberagamaan purifikasionis menjadi fakta sosiologis yang banyak kita jumpai di kalangan masyarakat kita. Mereka memiliki keyakinan bahwa model beragama yang benar haruslah murni dari berbagai macam ketercampuran unsur-unsur budaya lokal yang dianggap tidak Islami. Mereka menganggap syirik terhadap praktik keberagamaan yang telah bercampur dari budaya lokal. Oleh karena itu, mereka sangat mengutuk dan membenci praktik-praktik keberagamaan yang telah bercampur dengan budaya lokal seperti slametan, larung sesajen, sedekah bumi, dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini, kelompok purifikasionis jugalah yang sering melontarkan kritik dan ketidaksetujuan mereka atas gagasan moderasi beragama. Moderasi beragama dianggap program pendangkalan akidah yang didesain oleh para musuh Islam dalam rangka merongrong dan meruntuhkan

agama ini. Tak jarang mereka bahkan menuduh program moderasi beragama sebagai proyek non-Muslim, Yahudi dan liberalis yang diinjeksi kepada tubuh umat Islam untuk melemahkan militansi keberagamaan mereka. Secara konseptual, mereka menganggap program moderasi tidak memiliki pijakan tekstual-normatif yang kokoh dan tidak menunjukkan kejelasan posisi teologis yang kuat. Oleh karena itu, mereka mengeritikinya sebagai konsep “la-wala” (tidak ke kanan ataupun ke kiri; tidak ke Barat maupun ke Timur).

## MILITANSI MODERASI BERAGAMA

Bagi kita umat Islam di Indonesia, konsep moderasi beragama menjadi kekuatan dan modalitas sosial yang membuat wajah keberagamaan kita menjadi sejuk, damai, indah, toleran dan *rahmatan lil alamin*. Modalitas sosial-keberagamaan semacam ini sudah barang tentu menjadi anugerah yang tidak ternilai harganya di tengah berkecamuknya konflik kekerasan yang melanda umat Muslim di belahan dunia lain (baca: beberapa negara mayoritas Muslim di Timur Tengah). Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mensyukuri anugerah ini dengan merayakan dan mempraktikkan moderasi beragama secara konsisten, sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Terlebih lagi, konsep moderasi beragama telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Artinya, sudah menjadi program nasional yang harus diimplementasikan oleh segenap ASN dan kementerian-kementerian yang ada. Sebagai bagian dari tanggungjawab kenegaraan, maka Kementerian Agama menjadi institusi garda terdepan dalam mengamankan dan menjalankan program moderasi beragama di seluruh jenjang kelembagaan. Tidak boleh ada standar ganda dalam menyikapi dan memahami program moderasi beragama kecuali hanya satu kata: “Laksanakan”.

Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agama RI, moderasi beragama dicirikan oleh aspek-aspek berikut ini; 1). Anti-kekerasan dalam menjalankan misi dakwah keagamaan; 2). Prinsip toleransi dalam menyikapi perbedaan; 3). Memiliki wawasan kebangsaan yang kukuh (nasionalisme); 4). Akomodatif terhadap tradisi lokal (Kemendagri RI, 2019). Keempat aspek ini adalah “standar minimal” bagi seseorang untuk disebut moderat. Ada juga syarat-syarat lain yang bisa ditambahkan di sini seperti berpikir rasional dan terbukanya pintu ijtihad. Dengan demikian, siapapun umat Muslim yang tidak memiliki salah satu atau beberapa aspek di atas, berarti dia masih belum bisa disebut moderat.

Perlu juga dipahami bersama bahwa ketidakjelasan pendirian keagamaan sebagaimana dituding oleh kelompok non-moderat dapat dipatahkan dengan argumentasi normatif-teologis sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an: “*dan yang demikian telah Kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia...*” (QS. Al-Baqarah 143). Selain itu, paradigma moderasi beragama juga sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Saw.; “sebaik-baik persoalan adalah yang (berada) di tengah-tengah”. Rasulullah Saw. juga bersabda: “tengah-tengah itu adil; kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah (terbaik)” (HR Tirmidzi dan Ahmad). Dalil-dalil normatif semacam ini mestinya membuat kita umat Muslim semakin teguh, militan dan konsisten dalam menyikapi dan melaksanakan konsep moderasi beragama. (\*)